

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) BADAN KEUANGAN

KOLOM 1	SKPD	Badan Keuangan																																	
	Program	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah																																	
	Kegiatan	Penatausahaan Barang Milik Daerah																																	
	Indikator Kinerja	1 Jumlah laporan BMD Tahunan 2 Jumlah dokumen yang disusun pengurus barang 3 Jumlah pengurus barang yang dibayarkan honoranya																																	
	Tujuan	Pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah																																	
KOLOM 2	Data Pembuka Wawasan (Data Terpilah / Data Pilah Gender)	<u>Data Umum</u> 1 Jumlah laporan BMD Tahunan yang disusun sebanyak 4 laporan 2 Jumlah dokumen yang disusun oleh Pengurus Barang pada 29 SKPD dan direkap sebanyak 2 buku 3 Jumlah pengurus barang yang melaksanakan kegiatan ini sebanyak 142 orang dengan rincian data sebagai berikut																																	
		<table><tr><td>No.</td><td>Uraian</td><td>L</td><td>P</td><td>Jumlah</td></tr><tr><td>1</td><td>Pengurus Barang Pembantu, PembantuPengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Brang Pengguna</td><td>39</td><td>103</td><td>142</td></tr></table>				No.	Uraian	L	P	Jumlah	1	Pengurus Barang Pembantu, PembantuPengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Brang Pengguna	39	103	142																				
		No.	Uraian	L	P	Jumlah																													
		1	Pengurus Barang Pembantu, PembantuPengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Brang Pengguna	39	103	142																													
		<u>Akses</u> Akses Laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan pengeolaan BMD terbuka luas																																	
		<u>Partisipasi</u>																																	
		<table><tr><td>No.</td><td>Uraian</td><td>L</td><td>P</td><td>Jumlah</td></tr><tr><td>1</td><td>Jumlah Pengurus Barang Pengelola</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengelola</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>Jumlah Pengurus Barang Pengguna</td><td>8</td><td>20</td><td>28</td></tr><tr><td>4</td><td>Jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna</td><td>6</td><td>12</td><td>18</td></tr><tr><td>5</td><td>Jumlah Pengurus Barang Pembantu</td><td>24</td><td>69</td><td>93</td></tr></table>				No.	Uraian	L	P	Jumlah	1	Jumlah Pengurus Barang Pengelola	0	1	1	2	Jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengelola	1	1	2	3	Jumlah Pengurus Barang Pengguna	8	20	28	4	Jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna	6	12	18	5	Jumlah Pengurus Barang Pembantu	24	69	93
		No.	Uraian	L	P	Jumlah																													
		1	Jumlah Pengurus Barang Pengelola	0	1	1																													
		2	Jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengelola	1	1	2																													
3	Jumlah Pengurus Barang Pengguna	8	20	28																															
4	Jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna	6	12	18																															
5	Jumlah Pengurus Barang Pembantu	24	69	93																															
1 Jumlah pengurus barang pengelola berjumlah 1 orang perempuan 2 Jumlah pembantu pengurus barang pengelola berjumlah 2 orang laki-laki dan perempuan berjumlah sama 3 Jumlah pengurus barang pengguna 8 orang laki-laki dan 20 orang perempuan 4 Jumlah pembantu pengurus barang pengguna 6 orang laki-laki dan 12 orang perempuan 5 Jumlah pengurus barang pembantu 24 orang laki-laki dan 69 orang perempuan																																			

			<div><div><div>Kontrol</div><table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>L</th><th>P</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>Pengelola BMD</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>Pengelola BMD dan Pengguna Barang</td><td>24</td><td>3</td><td>27</td></tr></table></div><div><div>Manfaat</div><p>Pengurus Barang yang kompeten akan menghasilkan Laporan yang akurat dan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p></div></div>	No.	Uraian	L	P	Jumlah	1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD	1	0	1	2	Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD	1	0	1	3	Pengelola BMD	1	0	1	4	Pengelola BMD dan Pengguna Barang	24	3	27
No.	Uraian	L	P	Jumlah																								
1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD	1	0	1																								
2	Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD	1	0	1																								
3	Pengelola BMD	1	0	1																								
4	Pengelola BMD dan Pengguna Barang	24	3	27																								
KOLOM 3	I S U G E N D E R	Faktor Kesenjangan/Permasalahan (Akses, Partisipasi, kontrol, manfaat	<div><div><div>Akses</div><p>Semua ASN pada Pemerintah Kota Bukittinggi (Laki-laki dan perempuan) mempunyai peluang sebagai Pengurus Barang</p></div><div><div>Partisipasi</div><ul style="list-style-type: none">* Jumlah Pengurus Barang perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki* Laki-laki lebih banyak ditempatkan pada level kontrol* Pengurus Barang Pengelola yang berada pada level koordinator pengurus barang dijabat oleh perempuan* Sebagian besar perempuan ditempatkan pada posisi pengurus barang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan* Laki-laki lebih banyak berada pada level pimpinan/pemberi perintah/pengusul pengurus barang</div><div><div>Manfaat</div><p>Penatausahaan BMD akan membantu SKPD dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku</p></div></div>																									
KOLOM 4		Sebab kesenjangan internal (di SKPD)	<div><div>1</div><div>Kurangnya kapasitas sumber daya manusia perempuan yang berada pada posisi pengambil keputusan</div></div>																									
KOLOM 5		Sebab kesenjangan eksternal	<div><div>1</div><div>Perempuan masih dianggap kaum pasif, lemah dan dependen yang hanya mampu melakukan pekerjaan administratif dan bidang pelayanan jasa</div></div> <div><div>2</div><div>Perempuan hanya sedikit yang menduduki jabatan managerial atau pengambil keputusan</div></div> <div><div>3</div><div>Belum dipahaminya regulasi yang menegaskan keharusan melaksanakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan</div></div>																									
KOLOM 6	Reformulasi Tujuan		Mewujudkan pengelolaan BMD yang sesuai dengan aturan perundangan dan memberi nilai tambah bagi pengurus barang baik bagi perempuan maupun laki-laki																									
KOLOM 7	Rencana Aksi		<div><div>1</div><div>Melakukan pemahaman tentang tugas-tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan pada semua anggota tim</div></div> <div><div>2</div><div>Memberikan penajaman materi baik kepada laki-laki maupun perempuan dalam bentuk bimbingan teknis</div></div>																									

			3 Memberikan nilai tambah berupa honorarium kepada laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan penatausahaan BMD sesuai dengan aturan
KOLOM 8		Data Dasar	1 Jumlah Pengurus Barang 142, 39 orang laki-laki atau sebesar 27,46% dan 103 orang perempuan atau 72,54%
KOLOM 9	P E N G U K U R A N H A S I L	Output	<u>Rumusan Kinerja</u> Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah <u>Indikator Kinerja</u> Jumlah laporan BMD yang dihasilkan 4 laporan, Jumlah dokumen yang disusun pengurus barang sebanyak 2 buku dan jumlah pengurus barang yang dibayarkan honorinya 142 orang
		Outcome	<u>Rumusan Kinerja</u> Pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku <u>Indikator Kinerja</u> <ol style="list-style-type: none"> 1 Jumlah laporan BMD yang dihasilkan 4 laporan, Jumlah dokumen yang disusun pengurus barang sebanyak 2 buku dan jumlah pengurus barang yang dibayarkan honorinya 142 orang 2 Pengurus Barang baik laki-laki maupun perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh bimbingan teknis 3 Pengambil keputusan penetapan pengurus barang memberi kesempatan yang sama untuk perempuan dan laki-laki dalam mengusulkan pengurus barang

KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI


HERRIMAN, SH., M. Hum
NIP. 19680525 199308 1 001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) BADAN KEUANGAN

KOLOM 1	SKPD	Badan Keuangan				
	Program	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Kegiatan	Penyusunan dan Pengesahan DPA dan DPPA				
	Indikator Kinerja	1. Jumlah DPA yang ditetapkan dan disahkan sesuai APBD 2. Jumlah DPPA yang ditetapkan dan disahkan sesuai APBD				
	Tujuan	Pengeloaan Keuangan Pemerintah Sesuai dengan aturan yang berlaku				
KOLOM 2	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	<u>Data Umum</u>				
		No.	Uraian	L	P	Jumlah
		1	Jumlah SKPD	-	-	28
		2	Jumlah ASN pada Badan Keuangan			
		<u>Akses</u> Akses Laki-laki dan perempuan untuk asistensi, verifikasi dan pengesahan DPA SKPD dan DPPA SKPD terbuka luas				
		<u>Partisipasi</u>				
		No.	Uraian	L	P	Jumlah
		1	Jumlah anggota asistensi dan verifikator pengesahan DPA dan DPPA SKPD	6 orang	8 orang	14
		2	Jumlah Wakil koordinator untuk pelaksanaan kegiatan asistensi dan verifikasi pengesahan DPA dan DPPA SKPD	3 orang	0	3
		3	Pendidikan terakhir Min D3	9 orang	8 orang	17
		4	Pendidikan terakhir basis keuangan	1 orang	6 orang	7
		5	Lama Bekerja pada Badan Keuangan > 3 tahun	8 orang	7 orang	15
		6	Lama Bekerja pada Badan Keuangan < 3 tahun	1 orang	1 orang	2
		<u>Kontrol</u>				
No.	Uraian	L	P	Jumlah		
1	Sekretaris Daerah	1 orang				
2	Kepala Badan Keuangan	1 orang	0	1		
3	Sekretaris	0	1 orang	1		
4	Kepala Bidang	1 orang	0	1		
<u>Manfaat</u> Asistensi dan verifikasi membantu SKPD dalam pengelolaan keuangan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku						
KOLOM 3		Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Partisipasi, kontrol, manfaat	<u>Akses</u> Semua ASN pada Badan Keuangan (Laki-laki dan perempuan) mempunyai peluang sebagai asisten dan verifikator pada kegiatan asistensi, verifikator dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD			

	I S U G E N D E R		<p><u>Partispasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Jumlah anggota asisten dan verifikator pengesahan DPA dan DPPA SKPD perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki * Laki-laki lebih banyak ditempatkan pada level koordinator * Wakil koordinator pada kegiatan asisten dan verifikator pengesahan DPA dan DPPA SKPD semuanya laki-laki Asisten dan verifikator dengan latar belakang pendidikan D3 berbasis keuangan lebih banyak perempuan, perempuan juga lebih banyak yang berlatar belakang S1, dimana seharusnya perempuan bukan hanya pada level anggota saja * Pada level kontrol perempuan hanya 1 orang, sedangkan laki-laki 3 orang <p><u>Manfaat</u></p> <p>Asistensi dan verifikasi DPA dan DPPA akan membantu SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Sesuai dengan aturan yang berlaku</p>
KOLOM 4		Sebab kesenjangan internal (di SKPD)	1 Kurangnya kapasitas sumber daya manusia untuk melakukan analisis gender pada kegiatan asistensi, verifikasi dan pengesahan DPA DPPA SKPD
KOLOM 5		Sebab kesenjangan eksternal	1 Perempuan masih dianggap kaum pasif, lemah dan dependen yang hanya mampu melakukan pekerjaan administratif dan bidang pelayanan jasa 2 Perempuan hanya sedikit yang menduduki jabatan managerial atau pengambil keputusan 3 Belum dipahaminya regulasi yang menegaskan keharusan melaksanakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan
KOLOM 6	Reformulasi Tujuan		Asistensi, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku
KOLOM 7	Rencana Aksi		1 Melakukan pemahaman tentang tugas-tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan pada semua anggota tim 2 Memberikan penajaman materi baik kepada laki-laki maupun perempuan dalam melakukan asistensi dan verifikasi DPA dan DPPA 3 Memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berperan sebagai koordinator anggota tim
KOLOM 8	P E N G U K U R A N	Data Dasar	1 Jumlah anggota tim asistensi, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA 14, 6 orang laki-laki atau sebesar 42% dan hampir berimbang dengan 8 orang perempuan atau 57% 2 Wakil koordinator berjumlah 3 orang dan semuanya laki-laki (100%)
KOLOM 9		Output	<p><u>Rumusan Kinerja</u></p> <p>Terlaksananya asistensi dan verifikasi membantu SKPD dalam pengelolaan keuangan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku</p>

H A S I L		<u>Indikator Kinerja</u> Terlaksananya asistensi, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA dari 28 SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku
	Outcome	<u>Rumusan Kinerja</u> Terlaksananya asistensi penyusunan DPA dan DPPA SKPD dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku <u>Indikator Kinerja</u> <ol style="list-style-type: none"> 1 Terlaksananya asistensi penyusunan DPA dan DPPA Kegiatan pada SKPD dapat dilaksanakn dengan baik sesuai dengan DPA dan DPPA yang telah tersusun sesuai dengan aturan yang berlaku 2 Diharapkan pelaku kegiatan terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan sama pada setiap jenjang level, baik itu level koordinator ataupun anggota dan level kontrol 3

KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI



HERRIMAN, SH. MHum
NIP. 196805251993081001